

# ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEKERJAAN SOSIAL

Oleh:  
Nurul husna

## Abstrak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Kesejahteraan sosial bisa diartikan sebagai sebuah ilmu karena dalam kajiannya mencakup konsep-konsep, teori, metode, dan paradigma. Pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional yang didasari oleh *body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *body of skills* (kerangka keahlian), dan *body of values* (kerangka nilai). Pekerjaan Sosial merupakan salah satu disiplin yang berperan dalam pembentukan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Sehingga keduanya saling berhubungan erat dan mempunyai keterkaitan satu sama lain.

*Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosial*

## A. Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai pegangan hidup umat Islam banyak membicarakan tentang pentingnya kesejahteraan sosial serta keadilan sosial dalam masyarakat. Pengakuan bahwa Al-Qur'an sebagai kitab Umat Islam yang banyak membicarakan tentang keadilan sosial tidak hanya diakui oleh umat Islam saja, tetapi juga diakui oleh umat agama lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh S. Vivekananda, yang dikutip oleh Maulana W. Khan, dalam Lessy<sup>1</sup>, “*If ever any religion approached to this equality in any appreciable manner, it is islam and islam alone*” (jika ada agama yang melakukan pendekatan terhadap persamaan

---

<sup>1</sup> Zulkipli Lessy, keadilan sosial dan Kesejahteraan Sosial dalam Islam (Peran pekerja Sosial dalam Mewujudkan Keadilan & kesejahteraan Sosial), dalam Model-model Kesejahteraan social Islam Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis, Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bekerjasama dengan IISEP-CIDA, 2009. hlm 29-30.

(*social justice and social welfare*), maka agama tersebut adalah Islam dan Islam sendiri).

Menurut Maulana W. Khan dalam Lessy, menyatakan kontribusi Islam dalam kepeduliannya terhadap keadilan sosial dapat dilihat pada tiga topik utama. *Pertama*, Al-Qur'an merupakan formulasi dari suatu ideologi yang lengkap membicarakan tentang keadilan, kesejajaran serta kesejahteraan sosial untuk manusia. *Kedua*, Al-Qur'an memberikan dorongan untuk mengadaptasikan ideologi ini. Dan *ketiga*, Al-Qur'an mendorong penegakan keadilan, kesejajaran, dan kesejahteraan sosial dalam semua aspek kehidupan manusia.

Membahas tentang keadilan dan kesejahteraan, jika mengacu pada al-Qur'an maka keadilan lebih didahulukan. Hal ini termaktub dalam surat Al-Maidah (5) ayat 8: “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.<sup>2</sup>

Allah juga berfirman dalam surat al-A'raf (7) ayat 96: “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>3</sup>

Selanjutnya dalam surat Nuh (71) ayat 10-12 disebutkan yang artinya: “Maka aku (Nuh) katakan kepada mereka: mohonlah ampunan kepada TuhanMu, sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengiriskan hujan lebat kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.”<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas maka dapat dilihat bahwa keadilan akan mengantarkan kepada ketakwaan, sedangkan ketakwaan akan membawa kepada kesejahteraan, dimana Allah akan melimpahkan karunia dan kasih sayangNya untuk orang-orang yang takwa, yaitu orang-orang yang berlaku adil.

## **B. Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya.<sup>5</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan

---

2 Departemen Agama RI, Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, Jakarta: Maghfirah Pustaka, hlm. 108.

3, Al-A'raf, ibit, hlm, 163.

4 Nuh, ibit, hal. 570-571.

5 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 572.

menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>6</sup>

Namun, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.<sup>7</sup>

Kesejahteraan sosial di negara-negara maju, disebut dengan jaminan sosial (*social security*), seperti bantuan sosial (*social assistance*) dan jaminan sosial (*social insurance*), yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.<sup>8</sup>

Akan tetapi dalam konteks yang sangat luas kesejahteraan sosial banyak diinterpretasikan bermacam-macam arti dan makna. Pemaknaan yang luas tentang kesejahteraan sosial tidak dapat disalahkan karena pembahasan kesejahteraan sosial memiliki berbagai ruang lingkup, mulai dari kesejahteraan sosial bermakna "kondisi" menurut UU No 6 tahun 1974 yang berisi tentang pokok-pokok kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial sebagai "sistem organisasi" yang terimplementasi dalam bentuk sistem organisasi pelayanan kemanusiaan seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Panti-panti sosial, dan lain-lain. Serta ada juga yang mengartikan kesejahteraan sosial sebagai sebuah "gerakan/aktivitas", pemaknaan tersebut tidak bisa dilepaskan bahwa sebuah gerakan atau aktivitas manusia dapat meningkatkan taraf hidup (*well-being*) agar dapat bersaing dan berkelanjutan hidup di masyarakat.

Dari ketiga arti tersebut, makna kesejahteraan sosial tidak hilang begitu saja tetapi ada salah satu arti atau makna lain yang dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan dan pembangunan bangsa saat ini. Arti yang keempat itu adalah "ilmu/science". Kesejahteraan sosial bisa diartikan sebagai sebuah ilmu karena dalam kajian ilmu kesejahteraan sosial mencakup konsep-konsep, teori, metode, dan paradigma. Sebagai ilmu, ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu yang sangat muda diantara disiplin ilmu yang lainnya seperti Psikologi, Antropologi, Ekonomi, Sosiologi dll.

Dalam hal ini peranan ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu murni lainnya. Apabila diasumsikan maka ilmu murni seperti, Sosiologi, Psikologi, Antropologi merupakan bapak dan ibu sedangkan ilmu kesejahteraan sosial merupakan anak dari pencampuran dua atau lebih ilmu murni yang dapat diterapkan kajiannya di lapangan sebagai bentuk pertolongan dan penyelesaian masalah sosial di masyarakat. Akan tetapi tidak semua ilmu-ilmu murni dapat diadopsi dalam ilmu kesejahteraan sosial

---

6 Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia bab I Pasal 1.

7 Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: AIFABETA, 2005, hlm. 34.

8 Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 3.

sebagai konsep, teori, dan metode karena kajian yang akan dipakaipun sebagai obyek sasaran dari ilmu kesejahteraan sosial harus dapat diimplementasikan menurut kondisi obyek sasaran serta pendekatan yang digunakan harus holistik sehingga diketahui permasalahan yang akan dikaji dan memiliki tujuan yang cukup jelas.<sup>9</sup>

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan pelayanan-pelayanan sosial. Seperti halnya Sosiologi, psikologi, Antropologi, Ekonomi, Politik, Studi Kependudukan, dan Pekerjaan Sosial, ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya, dan strategi penanggulangannya.

### C. Latar belakang sejarah

Sejarah keberadaan Ilmu Kesejahteraan Sosial, pada awalnya tidak dapat dilepaskan dari Filsafat dimana Filsafat merupakan asal mula ilmu pengetahuan yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu tersebut selanjutnya dijabarkan lagi sehingga bisa berdiri sendiri diri, seperti halnya Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Misalnya saja salah satu cabang filsafat yang menjadi pegangan bagi praktisi pekerja sosial profesional dalam ilmu kesejahteraan sosial yaitu tentang etika yakni aksiologi yang disebut dengan filsafat nilai, dimana standar nilai etis yang disepakati secara universal seperti keadilan, kejujuran, dan keiklasan kesemuanya ini menyentuh persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia baik mengenai jasmani maupun rohaninya.

Menurut Bertens, dalam Setiadi dkk, menyebutkan ada tiga jenis makna etika: Pertama, kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkahlakunya. Kedua, etika berarti juga kumpulan asa atau nilai moral, yang dimaksud di sini adalah kode etik. Dan ketiga, etika mempunyai arti sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk atau etika di sini sama dengan filsafat moral.<sup>10</sup> Dari ketiga pengertian etika yang telah disebutkan kesemuanya dipergunakan dalam melakukan intervensi praktek pekerjaan sosial. Oleh sebab itulah Filsafat tidak bisa dipisahkan dengan ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial.

Ilmu kesejahteraan sosial dan disiplin Pekerjaan Sosial saling berhubungan erat, karena kedua disiplin ini mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya, di mana Pekerjaan Sosial merupakan salah satu disiplin yang berperan dalam pembentukan Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Akar sejarah dari bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, sering kali dikaitkan dengan kondisi Eropa pada abad ke 18. Karena pada abad tersebut pemerintahan Inggris telah mengeluarkan beberapa peraturan perundangan untuk mengatasi masalah

---

<sup>9</sup> Edi, Suharto, *Paradigma Kesejahteraan sosial*, di sampaikan pada Seminar Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 6-7 September 2007.

<sup>10</sup> Setiadi. M Elly, hakam.A Kama, Efendi Ridwan, *Manusia, Nilai, Moral dan Hukum dalam Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006. hlm. 110-111

kemiskinan. Undang-undang kemiskinan yang paling terkenal pada masa itu adalah *Elizabethan Poor Law*, yang dikeluarkan pada tahun 1601, yang di dalamnya mencakup tiga kelompok penerimaan bantuan:

1. Orang-orang miskin yang kondisi fisiknya masih kuat (*the able bodied poor*). Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pengemis yang masih bertubuh kuat. Mereka diberi pekerjaan kasar (*low-grade employment*), dan para penduduk dilarang memberikan bantuan finansial kepada mereka, sehingga mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Orang-orang miskin yang kondisi fisiknya buruk (*the impotent poor*), seperti halnya: para lanjut usia, tuna netra (buta), tuna rungu (tuli), tuna wisma (tidak mempunyai tempat tinggal) mereka akan di tempatkan dalam satu panti yang disebut dengan *almhouse*, para ibu dengan anak yang masih kecil, dan para penderita cacat fisik maupun mental.
3. Anak-anak yang hidupnya masih tergantung pada orang yang lebih mapan (*Dependent Childrent*), yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, anak yatim piatu, bayi yang diterlantarkan (*foundslings*), atau anak-anak yang orang tuanya sudah sangat miskin sehingga tidak mampu membiayai anak-anaknya. Anak-anak ini ditawarkan pada warga setempat untuk dipekerjakan. Bagi anak laki-laki mereka bekerja pada tuannya sampai usia 24 tahun, sedangkan anak perempuan, biasanya mereka diangkat menjadi pembantu rumah tangga (*domestic servants*) dan dipekerjakan hingga mereka berusia 21 tahun.<sup>11</sup>

Undang-undang Kemiskinan yang dikeluarkan oleh ratu Elizabeth pada tahun 1601 dianggap sebagai cikal bakal intervensi pemerintah terhadap warga negara, dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Karena pada masa sebelumnya, usaha-usaha kesejahteraan sosial (*social services* atau *social welfare services*) lebih banyak dilakukan oleh kelompok keagamaan, seperti dari pihak gereja.

Menurut Canda dan Furma, dalam Rukminto, mengemukakan selain pihak Gereja, pada abad ke enam masehi agama Islam telah melakukan reformasi pada masanya dalam hal keadilan sosial, baik untuk kaum perempuan, anak-anak dan kelompok yang kurang diuntungkan, hal ini tergambar dari pandangan mereka bahwa:

*“Since the person and the community should be wholly oriented toward the will of Allah, there is no separation between religious and secular spheres of life. As Muhammad (peace be upon him) originally advocated for social reforms on behalf of women, children, and disadvantaged group, there is strong social justice value framework in Islam. Ideally, there should be a reciprocal relationship between individual freedom and community obligations and responsibilities.*

*The Qur’an condemns exploitation of the poor, widows, other women, orphans, and*

---

<sup>11</sup> Adi, Isbandi Rukminto. *Ilmu kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Pengantar Pada pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan)*, Jakarta: FISIP UI Press, 2005. hlm. 2.

*slaves. It denounces economic abuse, such as false contracts, bribery, boarding of wealth usury”*

(karena individu dan komunitas harus berorientasi satu, yaitu meraih ridha Allah, maka tidak ada pemisahan antara kehidupan agama dan kehidupan dunia Islam. Seperti Muhammad saw ajarkan (pada umat Muslim) untuk melakukan advokasi reformasi sosial berdasarkan kepentingan perempuan, anak-anak, dan kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan. Pada agama Islam terdapat penekanan yang sangat kuat pada kerangka nilai keadilan sosial. Secara ideal, seharusnya tercipta hubungan timbal balik yang saling melengkapi antara kebebasan individu dengan kewajiban dan tanggung jawab dari komunitas. AlQur'an mengutuk eksploitasi pada orang miskin, janda-janda, kaum perempuan, yatim piatu dan budak. AlQur'an juga mencela penyalahgunaan 'kekuatan' ekonomi, seperti melakukan kontrak palsu, penyuapan, menumpuk harta, dan riba).<sup>12</sup>

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa kegiatan sosial dari kelompok keagamaan sudah berakar jauh sebelum abad ke 16. Namun dari semua kegiatan yang dilakukan terdapat satu persamaan, yaitu adanya nilai kemanusiaan (humanitarianisme) yang dijunjung tinggi oleh masing-masing agama. Nilai-nilai humanitarianisme inilah yang menjadi titik awal untuk melihat bahwa apa yang terjadi pada sekelompok orang miskin tersebut tidaklah benar, sehingga dalam ajaran agama khususnya Islam menganjurkan untuk memperbaiki hal tersebut. Karena salah satu akar dari nilai humanitarianisme sendiri dapat dilihat nilai-nilai agama. Sehingga tindakan dari aktivis agamalah yang kemudian mengilhami berkembangnya para relawan kemanusiaan.

Hal ini dapat terlihat dari salah seorang pendiri (*prominent founder*) bidang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, yaitu Janes Addams (dilahirkan tahun 1860), ia aktif di Gereja Presbyterian, dan aktif menolong masyarakat miskin di Inggris dan juga Amerika, sehingga pada tahun 1931 ia mendapat hadiah Nobel Perdamaian.<sup>13</sup> Hal yang sama juga dialami oleh Bunda Theresa yang mendapat hadiah Nobel perdamaian karena usahanya mengentaskan kemiskinan di India pada abad ke 19. Nilai-nilai humanitarianisme terdapat juga dalam agama Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya dalam upaya pengentasan kemiskinan membantu masyarakat yang tertindas dan membutuhkan pertolongan.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragam Islam, maka anggota mesjid sangat berperan penting dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan sosial dilakukan secara gratis, selanjutnya setelah kesejahteraan sosial menjadi kajian dan usaha yang bersifat ilmiah/professional, khususnya pekerjaan sosial, menjadi persoalan terminologis tersendiri, ketika “ilmu” ini dikembangkan di Indonesia.

---

12 Ibid., hal. 3-4.

13 Zastrow, Charles. *Introduction to Social work and Social Welfare*. Sixth edition. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 2002. hlm.47.

## D. Dinamika Perkembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial, merupakan salah satu ilmu yang pada dekade terakhir ini berkembang, yaitu ilmu pengetahuan yang mendudukan berbagai teori sosial untuk memberikan layanan sosial secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai tingkatan kehidupan. Ilmu ini diajarkan dan dikembangkan sebagai bekal bagi masyarakat peserta pelajar supaya dapat melakukan pendampingan, layanan dan bantuan sosial secara maksimal dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat hidup secara mandiri, layak, berkelanjutan dengan berbekal kemampuan yang dimiliki yang belum didayagunakan.

### 1. Pekerjaan Sosial

Menurut International Federation of Social Worker (IFSW), pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian lain dari pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional dalam menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas masyarakat agar berfungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif guna terwujud suatu tujuan.<sup>15</sup> Sebagai aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh *body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *body of skills* (kerangka keahlian), dan *body of values* (kerangka nilai). Ketiga komponen tersebut dikembangkan dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, ekonomi, dan politik.

Dari pengertian di atas, tercermin bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (*people*) dengan lingkungannya, yang mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup (*human wellbeing*) masyarakat. Di sini tergambar bahwa, dalam perkembangan praktek pekerjaan sosial disiplin ilmu Psikologi dan Sosiologi memiliki peranan penting.

Berdasarkan kajian Islam yang berhubungan dengan pekerjaan sosial, dikarenakan Islam merupakan salah satu agama yang paling bertanggung jawab untuk mencari solusi terhadap problem sosial yang ada di masyarakat, maka dari itu terdapat beberapa aspek dasar yang saling terkait yakni: *pertama* dasar teologis, ini terlihat dari spirit kesatuan manusia dalam Islam tidak ada perlakuan diskriminasi terhadap manusia atas dasar apapun baik agama, ras, ekonomi, fisik, warna kulit, gender, suku, dan lain-lain. Dan manusia juga

---

<sup>14</sup> Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Hlm.3.

<sup>15</sup> Zastro, Charles H. *The Practice of Social Work*. sixth edition, Pacific Grove: Brook/Cole Publishing Company, 1999. Hlm. 5

dipandang sebagai kesatuan jasmani dan rohani di mana keduanya harus diperhatikan dan dikuatkan secara bersama-sama.

*Kedua* dasar akademik, *social work* (pekerjaan sosial) dapat ditelusuri melalui kajian dakwah, karena dakwah memiliki tujuan mulia untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan menurut nilai dan norma ajaran Islam yang dapat menunjukkan kepada kemaslahatan serta kesejahteraan. Dakwah dalam perspektif *social work* dapat dijabarkan lagi menjadi; 1) Pengembangan (*Development*), yakni dakwah dilakukan dalam rangka membantu seseorang agar dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan potensi yang dimiliki untuk mencapai kondisi hidup yang lebih sejahtera, 2) Layanan sosial (*social service*) hal ini dilakukan terhadap seseorang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial guna meningkatkan kesejahteraan terhadap mereka, dan yang ke 3) Pembelaan (advokasi), dakwah dalam hal ini dilakukan terhadap seseorang yang mengalami ketidakadilan dalam kehidupannya.

*Ketiga*, sosial atau operasional, adanya dasar sosial Islam tentang; zakat, infaq, sadaqah, pembebasan mustadh'afin, orang-orang tertindas karena korban kultur, perintah memerdekakan budak dan lain-lain.<sup>16</sup> Ilmu *social work* dalam hal ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengelola ajaran Islam tentang sosial, sehingga menjadi ajaran yang fungsional serta dampak sosialnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang kurang beruntung.

## 2. Ilmu Kesejahteraan Sosial

Sejarah perkembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial tidak bisa dilepaskan dari disiplin pekerjaan sosial, karena Ilmu kesejahteraan Sosial merupakan perkembangan pemikiran dari disiplin pekerjaan sosial. Akan tetapi, bila pada disiplin pekerjaan sosial (*social work*) pembahasan lebih banyak dipengaruhi oleh disiplin Psikologi dan Sosiologi. Ini dapat dilihat dengan mudah dari hasil bacaan yang ditulis oleh Malcolm Payne (*modern social work theory*). Dalam buku tersebut, pengaruh dari pendekatan Psikologi sangat dominan, kemudian dilengkapi dengan disiplin Sosiologi, yang diikuti dengan perspektif Ekonomi dan Manajemen, Hukum, Kesehatan dan Politik terasa lebih kental.<sup>17</sup>

Perkembangan ilmu kesejahteraan sosial itu sendiri pada dasarnya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu latar belakang sejarah dari ilmu kesejahteraan sosial, pada titik awal, masih sama dengan Pekerjaan Sosial. Perbedaan ini mulai terasa ketika sekolah atau jurusan yang ada bukan saja memfokuskan pada aspek pekerjaan sosial saja, tetapi sudah mengarah pada perkembangan dunia kesejahteraan yang lebih luas atau dari level mikro ke hal yang relatif lebih makro.

Ilmu kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan suatu ilmu yang mencoba mengembangkan pemikiran, strategi dan tehnik untuk meningkatkan derajat kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Rukminto, definisi ilmu kesejahteraan sosial merupakan suatu

---

<sup>16</sup> Suisyanto, Sriharini, Waryono A. Ghafur (ed), *Islam Dakwah & Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Jurusan PMI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bekerjasama dengan IISEP-CIDA, 2005. Hlm. X-Xi.

<sup>17</sup> Lihat pembahasan Malcolm Payne, *Modern Social Work Theory*. second edition, Chicago: LYCEUM BOOKS. INC, 1997



ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang (termasuk di dalamnya kesempatan bekerja dan berpartisipasi dalam pembangunan).<sup>18</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas terlihat bahwa ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan yang mempunyai fokus kajian baik teoritis maupun metodologis terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup (derajat kehidupan) bagi masyarakat.

a. Sasaran Ilmu Kesejahteraan Sosial

Sasaran ilmu kesejahteraan meliputi beberapa hal diantaranya:

1. Kondisi Kesejahteraan (individu, kelompok, dan komunitas)
2. Aktivitas Kesejahteraan
3. Kebutuhan (pelayanan sosial)
4. Fakta kesejahteraan
5. Institusi / organisasi pelayanan sosial, dan
6. Negara kesejahteraan.

b. Aspek utama dalam perkembangan ilmu kesejahteraan sosial maupun praktek pekerjaan sosial

Dalam kaitannya dengan upaya mengembangkan fungsi memberikan pertolongan, ilmu kesejahteraan sosial dituntut untuk mempunyai kerangka pemikiran (*theoretical background*) yang cukup memadai untuk mendukung perkembangan dan metodologi dan juga Praktek kesejahteraan sosial. Untuk itu maka terdapat tiga aspek utama yang harus diperhatikan yaitu:

1. Aspek Kerangka Pemikiran (*theoretical background*) yang memberikan landasan pengetahuan untuk mengembangkan metodologi guna meningkatkan kesejahteraan sosial
2. Aspek Metodologi (*Methodology*), yang terkait dengan dua unsur utama ilmu kesejahteraan sosial, sebagai ilmu terapan yaitu:
  - a. Metode Penelitian (*Research method*), antar lain berfungsi sebagai metode yang dikembangkan guna melakukan telaah yang bersifat praktis terhadap fenomena yang ada, maupun upaya intervensi sosial (perubahan sosial terencana) yang telah dikembangkan.
  - b. Metode Intervensi (*Intervention Method*), khususnya metode intervensi sosial. Metode intervensi ini perlu dikembangkan terkait dengan keberadaan ilmu Kesejahteraan sosial sebagai Ilmu Terapan, dengan sasarannya adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat. Tanpa adanya metode intervensi yang dikembangkan maka ilmu kesejahteraan sosial akan mandek. Karena itulah pengkajian dan pembaharuan model intervensi baik strategi maupun tehnik

---

<sup>18</sup> Lihat Rukminto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan pekerjaan Sosial....*, hlm. 17.

harus terus dilakukan sejalan dengan adanya perubahan pada masyarakat.

3. Aspek Praktek (*Practice*) juga merupakan aspek yang harus dikembangkan terkait dengan keberadaan ilmu kesejahteraan sosial sebagai ilmu terapan. Tanpa adanya aspek Praktek, seseorang mahasiswa akan sulit untuk mengembangkan ketrampilan praktisnya.<sup>19</sup>

c. Orientasi ilmu kesejahteraan sosial

Menurut Sumarnonugroho, dalam Suud, ilmu kesejahteraan sosial memiliki tiga orientasi yang dalam prakteknya saling berkaitan. Masing-masing adalah:

1. Orientasi akademik, mengemban tugas memprediksikan dan memecahkan masalah secara teoritis, Ilmu kesejahteraan sosial diharapkan menunjukkan kompetensinya membina teori-teori, baik dalam mengembangkan meta teori (pembinaan dan pengembangan teori dan hipotesa teori) maupun teori Praktek (penciptaan model-model pemecahan masalah).
2. Orientasi klinis, mengemban tugas mengarahkan tinjauan teoritik dan prediksi ilmu sistem klien,<sup>20</sup> mencakup kegiatan diagnose klien dan keterlibatan terhadap pemecahan masalah. Orientasi ini dikedepankan sejak awal perkembangan ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial.
3. Orientasi strategik, mengemban tugas memandang masalah yang ada di luar sistem klien. Sumberdaya atau lingkungan diluar diri klien berpengaruh terhadap pemecahan masalah klien. Studi-studi kelayakan, riset dan kebijakan sosial politik menandai keterkaitannya dengan penerapan ilmu kesejahteraan sosial dan Praktek pekerjaan sosial.<sup>21</sup>

d. Pusat perhatian ilmu kesejahteraan sosial

Ilmu kesejahteraan sosial memfokuskan perhatiannya terhadap orang-orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan akan pelayanan-pelayanan sosial dari lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, khususnya yang tidak dapat memenuhinya berdasarkan kriteria pasar.<sup>22</sup>

Gambaran tentang lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, khususnya yang disediakan oleh negara, perhatian biasanya terfokus pada pelayanan-pelayanan pokok. Ini sering disebut dengan lima besar pelayanan-pelayanan sosial, yang meliputi program-program pemeliharaan penghasilan seperti jaminan sosial dan asistensi sosial, pelayanan kesehatan, program pendidikan, perumahan, dan pelayanan pekerjaan

---

19 Lihat Rukminto, ... hlm. 42.

20 Sistem klien adalah orang-orang yang telah memberikan kewenangan atau meminta untuk memberikan kewenangan, diharapkan mejadi penerima bantuan di dalam usaha perubahan dan telah melibatkan diri melalui suatu persetujuan kerja atau kontrak dengan pekerja sosial. Chusnan Jusuf (ed), *Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: BALATBANGSOS DEPSOS RI, 2005. Hlm. 55.

21 Mohammad Suud, 3 *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publhiser, 2006. Hlm. 22-23.

22 Ibid, hlm. 33.

sosial yang dikenal juga dengan sebutan pelayanan sosial personal.

e. Metode Ilmu Kesejahteraan Sosial

Ilmu pengetahuan mensyaratkan adanya metode yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan, karena ilmu merupakan pengetahuan yang mempunyai cara-cara tertentu, atau bermetode, maka pengetahuan keilmuan (*science*) berbeda dengan pengetahuan pada umumnya (*knowledge*).

Menurut Suriasumantri, dalam memperoleh ilmu pengetahuan harus memenuhi dua pola yakni; Rasional dan empiris. Rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis. Sedangkan empirisme menyajikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran. Gabungan dari kedua metode inilah yang dinamakan metode keilmuan.<sup>23</sup>

Metode keilmuan yang dipakai dalam ilmu kesejahteraan sosial tidak hanya satu macam melainkan bermacam-macam. Ini dikarenakan sasaran dari ilmu kesejahteraan sosial tidak hanya satu melainkan lebih dari satu. Hal ini dapat dilihat bahwa ilmu kesejahteraan sosial berada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu bukan merupakan permasalahan jika ilmu kesejahteraan sosial mengadopsi metode-metode keilmuan yang sudah lazim dipakai oleh ilmu-ilmu sosial lain, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, maupun ilmu politik.

Pada realitasnya ilmu-ilmu sosial tersebut selalu berbagi metode keilmuan dengan ilmu kesejahteraan sosial, sebab dengan adanya kerjasama antara sosiolog, psikolog, antropolog, dan ilmuwan politik dengan sarjana kesejahteraan sosial/pekerja sosial dalam menganalisis menemukan solusi untuk mengatasi kompleksitas masalah yang ada di masyarakat. Inilah yang disebut dengan pendekatan multidisipliner atau interdisipliner

Dalam konteks ilmu kesejahteraan sosial dikenal dengan sistem kesejahteraan sosial yang terdiri dari empat komponen yang saling berhubungan, yaitu masalah sosial, tujuan kebijakan, perundangan/peraturan, dan program.<sup>24</sup> Ini merupakan konseptualisasi sistem kesejahteraan sosial yang paling sederhana. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu kesejahteraan sosial juga menjelaskan mengapa diadakan atau diperlukan program-program kesejahteraan sosial, seperti teori hak akan kesejahteraan sosial, teori konvergensi, pandangan fungsionalis, pandangan Marxist, dan pandangan keadilan sosial. Dari hasil kerja keilmuan tersebutlah sehingga dapat memperkuat kedudukan kesejahteraan sosial sebagai ilmu, di samping pekerjaan sosial sebagai ilmu terapan (profesi).

## E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, nyata bahwa kesejahteraan sosial, di samping sebagai bidang kajian dan praktek, merupakan pengetahuan yang terorganisasi

---

23 Jujun S. Suriasumantri (ed), *Ilmu dalam Perspektif: sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu*, Jakarta: P.T. Gramedia, 1984. Hlm. 10.

24 Lihat Suud, ...hal. 40-41.

dengan baik, karena memiliki kerangka pemikiran yang cukup memadai untuk mendukung perkembangan metodologi dan juga praktek kesejahteraan sosial, sasaran, titik perhatian, dan metode keilmuan yang jelas. Dalam mengembangkan tugas keilmuan kesejahteraan sosial memiliki tiga orientasi yang tidak dapat dipisahkan tetapi bisa dibedakan secara analitis, yaitu: akademik, klinik, dan strategik.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. *Ilmu kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Pengantar Pada pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan)*, Jakarta:FISIP UI Press, 2005.

Chusnan Jusuf (ed), *Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: BALATBANGSOS DEPSOS RI, 2005.

Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* Jakarta: Maghfirah Pustaka

Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: AIFABETA, 2005

\_\_\_\_\_, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama,2006.

\_\_\_\_\_, *Paradigma Kesejahteraan sosial*, di sampaikan pada Seminar Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 6-7 September 2007.

Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Jujun S. Suriasumantri (ed), *Ilmu dalam Perspektif: sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu*, Jakarta: P.T. Gramedia, 1984.

Mohammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publhiser, 2006.

Malcolm Payne, *Modern Social Work Theory*. second edition, Chicago: LYCEUM BOOKS. INC, 1997

Setiadi. M Elly, Hakam.A Kama, Efendi Ridwan, Manusia, Nilai, Moral dan Hukum dalam *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*; Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Suisyanto, Sriharini, waryono A. Ghafur (ed), *Islam Dakwah & Kesejahteraan Sosial*,

Yogyakarta: Jurusan PMI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Bekerjasama dengan IISEP-CIDA, 2005.

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia  
bab I Pasal 1.

Zastrow, Charles H. *The Practice of Social Work*. sixth edition, Pacific Grove: Brook/Cole  
Publishing Company, 1999.

\_\_\_\_\_. *Introduction to Social work and Social Welfare*. Sixth edition. Pacific  
Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 2002.

Zulkipli Lessy, *keadilan sosial dan Kesejahteraan Sosial dalam Islam (Peran pekerja  
Sosial dalam Mewujudkan Keadilan & kesejahteraan Sosial)*, dalam *Model-model  
Kesejahteraan social Islam Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis*, Fakultas  
Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan kalijag Yogyakarta  
Bekerjasama dengan IISEP-CIDA, 2009.

